

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan rencana pembangunan ekonomi untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui otonomi daerah, pembangunan daerah menjadi strategi utama, oleh karena itu pembangunan ekonomi yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi barang dan jasa yang akan melibatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Hidayat et al. (2011), peningkatan output berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi isu makroekonomi. Pemerintah mengutamakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertumbuhan ekonomi, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi atau mendorong pertumbuhan tersebut, misalnya investasi akan menambah jumlah barang modal yang berwujud dan tidak berwujud. Pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan angkatan kerja, pengalaman kerja dan pendidikan akan meningkatkan produktivitas serta pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi investasi atau belanja modal untuk menghasilkan produk-produk output.

Pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang pertama adalah nilai output total, dan yang kedua adalah jumlah penduduk. Menurut Boediono (2009) jumlah penduduk akan selalu meningkat, dan kebutuhan serta keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa

tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut maka pemerintah harus dapat meningkatkan output barang dan jasa.

Para ekonom mendefinisikan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), terlepas dari apakah pertumbuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk (Sukirno, 1995). Dari pemahaman tersebut terlihat bahwa produk domestik regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran yang digunakan sebagai dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB suatu daerah mencerminkan keberhasilan daerah dalam mencapai pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2019**

No	Wilayah	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/kota						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	SUMATERA BARAT (Provinsi)	6,08	5,88	5,53	5,27	5,30	5,16	5,05
2	Kepulauan Mentawai	5,77	5,57	5,20	5,02	5,12	4,91	4,76
3	Pesisir Selatan	5,90	5,80	5,73	5,33	5,41	5,35	4,81
4	Kab.Solok	5,63	5,79	5,44	5,31	5,32	5,22	5,07
5	Sijunjung	6,14	6,02	5,69	5,26	5,26	5,09	4,83
6	Tanah Datar	5,85	5,79	5,33	5,03	5,11	5,07	5,01
7	Padang Pariaman	6,20	6,05	6,14	5,52	5,58	5,46	2,51
8	Agam	6,15	5,92	5,52	5,51	5,51	5,26	4,81
9	Lima Puluh Kota	6,23	5,98	5,61	5,32	5,53	5,26	5,10
10	Pasaman	5,82	5,87	5,34	5,07	5,08	5,00	4,84
11	Solok Selatan	6,13	5,90	5,35	5,14	5,15	5,03	4,89
12	Dharmasraya	6,51	6,34	5,75	5,42	5,44	5,31	4,98
13	Pasaman Barat	6,40	6,04	5,70	5,34	5,34	5,24	4,49
14	Padang	6,66	6,46	6,41	6,17	6,23	6,09	5,68
15	Kota Solok	6,44	6,01	5,97	5,76	5,76	5,68	5,53
16	Sawahlunto	6,11	6,08	6,03	5,72	5,74	5,52	5,34
17	Padang Panjang	6,29	6,08	5,91	5,80	5,80	5,73	5,59
18	Bukittinggi	6,28	6,20	6,14	6,05	6,08	6,02	5,88
19	Payakumbuh	6,56	6,47	6,19	6,08	6,12	6,05	5,92
20	Pariaman	6,06	5,99	5,79	5,59	5,61	5,50	5,33

*Sumber: BPS Sumatera Barat*

Dari Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di lihat dari PDRB atas harga konstan 2010. Terlihat bahwa PDRB Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 hingga 2019 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Tetapi, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,30%. Dan untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tertinggi di kabupaten/kota Sumatera Barat adalah Payakumbuh sebesar 5,92% disusul oleh Bukittinggi sebesar 5,88% dan Padang sebesar 5,68%. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kepulauan Mentawai sebesar 5,02% posisi terendah setelah Kabupaten Agam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23%. Hal ini menunjukkan belum adanya pemerataan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama ini kesejahteraan hanya terkonsentrasi di beberapa kabupaten/kota yang memiliki sentra industri, atau kesejahteraan hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu dan tidak merata di antara semua kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi yang berarti daerah tersebut belum memiliki kesejahteraan dan kemakmuran yang merata dan terbaik.

Selain laju pertumbuhan, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah adalah melalui nilai produk domestik regional bruto (PDRB). Untuk menghasilkan *output* (barang dan jasa) diperlukan *input* dalam proses produksi yaitu berupa modal dan tenaga kerja, yang dijabarkan dalam teori pertumbuhan Solow-Swan berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas. Faktor produksi meliputi modal, tenaga kerja dan teknologi sebagai faktor eksogen (Kuncoro, 2010).

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2019**

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)	Pengeluaran pemerintah (Juta Rp)
2013	6,08	14.002.829.527.738
2014	5,88	15.383.747.544,56
2015	5,53	17.428.204.261,16
2016	5,27	19.715.159.996,82
2017	5,30	19.624.412.421,11
2018	5,16	19.977.633.367,95
2019	5,05	22.950.820.914,42

*Sumber: BPS Sumatera Barat*

Pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam perekonomian yang diukur dari nilai produk domestik regional bruto yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Menurut data yang diambil dari BPS, pembiayaan pengeluaran pemerintah yang rutin dianggarkan setiap tahun yang terdapat dalam anggaran belanja daerah yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi, investasi, gaji pegawai dan transfer payment. Pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 22,95 juta rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% dari tahun sebelumnya 19,97 juta rupiah. Setiap tahunnya pengeluaran pemerintah terus mengalami kenaikan. Pengeluaran pemerintah dalam investasi atau belanja barang dan modal untuk menghasilkan produk-produk output dan dari sisi produktifitas pegawai yang akan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

**Tabel 1.3**  
**Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2019**

Tahun	Pendidikan (%)
2013	74,07
2014	81,97
2015	82,53
2016	82,62
2017	82,59
2018	83,08
2019	83,63

*Sumber: BPS Sumatera Barat*

Pemerintah membuat kebijakan program pendidikan wajib belajar dua belas tahun atau wajib sekolah formal sampai SLTA semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan seseorang maka semakin baik pula keterampilan sumber daya manusia, hal tersebut akan berpengaruh terhadap produktifitas dan kualitas dalam memproduksi barang dan jasa yang akan berdampak pula terhadap produk domestik regional bruto. Tingkat pendidikan serta kualitas keterampilan seseorang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.441.197 jiwa pada tahun 2019 ini (BPS SUMBAR, 2019), jumlah penduduk yang begitu banyak ini juga mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan akan meningkatkan produksi *output* daerah. Tingginya pendidikan yang diperoleh seseorang akan baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin tinggi kualitas keterampilan seseorang akan meningkatkan produktifitas dan kapasitas inovasi karena ilmu pengetahuan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas modal manusia.

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2013-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Angkatan Kerja (%)</b>
2013	62,92
2014	65,19
2015	64,56
2016	67,08
2017	66,29
2018	67,26
2019	67,51

*Sumber: BPS Sumatera Barat*

Pada kenyataannya, di tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 67,51% meningkat di bandingkan tahun sebelumnya sebesar 67,26%. Apabila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan kerja maka akan menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, karena pada dasarnya tenaga kerja adalah modal bagi bergeraknya roda perekonomian. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2019 mencapai 5.441.197 jiwa, struktur penduduk bekerja didominasi oleh mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. (BPS SUMBAR,2019). Selain modal manusia di Provinsi Sumatera Barat memiliki angkatan kerja yang didominasi oleh tamatan SLTA tetapi cenderung fluktuatif. Seperti dikemukakan Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Angkatan kerja diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

**Tabel 1.5**  
**Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2013-2019**

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta rupiah)
2013	91.4
2014	112.1
2015	57.1
2016	79.3
2017	194.4
2018	180.8
2019	157.1

*Sumber: BPS Sumatera Barat*

Investasi menjadi hal yang baik untuk suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan ekonomi, dengan investasi dapat membuka lapangan pekerjaan karena hampir seluruh investasi yang masuk di Provinsi Sumatera Barat tersalurkan di sektor fisik seperti pembangunan restoran, hotel, pertokoan dll. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Investasi penanaman modal dalam negeri berfluktuasi yang berarti daerah tersebut belum memiliki pemerataan yang baik setiap tahunnya. Tahun 2013 total belanja modal yang dikeluarkan pemerintah adalah sebanyak 91,4 juta rupiah. Pada tahun 2014 belanja modal mencapai angka 112,1 juta rupiah. Dan pada tahun 2015 mengalami penurunan belanja modal sebesar 57,1 juta rupiah. Pada tahun 2016 belanja modal mencapai angka 79,3 juta rupiah. Tahun 2017 total belanja modal yang dikeluarkan pemerintah adalah sebanyak 194,4 juta rupiah. Tahun 2018 total belanja modal yang dikeluarkan pemerintah adalah sebanyak 180,8 juta rupiah. Dan pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 91,4 juta rupiah.

Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Provinsi Sumatera Barat mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktifitas penanaman modal khususnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) karena banyaknya tersedia

berbagai bahan mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan dan juga potensi daerah yang dijadikan objek wisata sehingga potensi-potensi daerah ini diberdayakan maka sangat besar manfaatnya dalam menambah pendapatan daerah dan juga menunjang terciptanya kegiatan ekonomi disekitar daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Dalam proses pembangunan tentu sudah banyak keberhasilan yang telah dicapai, namun demikian tidak dapat dipungkiri juga bahwa terjadi beberapa kegagalan dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan dalam arti luas pada dasarnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas tenaga kerja, serta mencapai kemakmuran masyarakat. Untuk itu perlu diteliti kenapa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang relatif rendah atau *relative* mengalami penurunan tiap tahunnya dan variabel ekonomi yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kemudian ditentukan suatu kebijakan yang dapat mencapai kondisi tersebut. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?



2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sangat memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu penulis dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu teoritis yang didapat dalam

perkuliahan. Sekaligus sebagai kemampuan tolak ukur dalam menganalisis untuk memenuhi tugas akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan di Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Bung Hatta.

2. Bagi Pemerintah, dapat menjadi hal pertimbangan variabel yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mengambil kebijakan pengalokasian dana pembangunan di masa mendatang. Sehingga pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat diarahkan ke sektor yang potensial sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat.